
ANALISIS INOVASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SERANG

Agus Lukman Hakim, Haryo Setyoko, Miftah Faiz Ali, Nopi Andayani*, Maya Oktaviani.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Indonesia

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a huge impact on society. The Serang Regency Government seeks to carry out breeding by conducting community empowerment programs. This study aims to analyze and evaluate program innovations and community empowerment activities carried out by regional officials in Serang Regency. Data collection techniques were carried out by means of documentation studies and interviews. The data analysis technique used descriptive analysis. The results of the study indicate that several activities based on community empowerment in Serang Regency that are relevant as needed are: a. Development of sports that are integrated with sports competitions at the district/district/village level. b. Sustainable tourism development (sustainable tourism development) and community based tourism development (community based tourism development). c. Technological innovation program (Appropriate Technology), as well as collaborating with the rural agricultural sector with the industrial sector. d. Development of incentive schemes for individual/community parties who carry out environmental improvement e. Millennial Farmers Program (West Java Province Benchmark) f. Creative City/Village Development In general, program innovations need to utilize and adapt to potential locations and utilization of digital 4.0 technology developments

Keywords:

Community empowerment, Serang Regency, innovation

Article history:

Submission May 24 2022
Revision June 13 2022
Accepted June 21 2022
Published June 30 2022

***Corresponding author**

Email:
nopi.andayani@stiabanten.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak besar bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Serang berupaya melakukan pemuliaan dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi inovasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kabupaten Serang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Serang yang relevan sesuai kebutuhan adalah: a. Pengembangan olahraga yang terintegrasi dengan kompetisi olahraga tingkat kabupaten/kabupaten/desa. b. Pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism development). c. Program inovasi teknologi (Teknologi Tepat Guna), serta menjalin kerjasama dengan sektor pertanian pedesaan dengan sektor industri. d. Pengembangan skema insentif bagi individu/masyarakat yang melakukan perbaikan lingkungan e. Program Petani Milenial (Tolok ukur Provinsi Jawa Barat). f. Pengembangan Kota/Desa Kreatif Secara umum, inovasi program perlu memanfaatkan dan beradaptasi dengan potensi lokasi dan pemanfaatan perkembangan teknologi digital 4.0.

Kata Kunci: Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, Kabupaten Serang, inovasi

PENDAHULUAN

Dalam mengantisipasi berbagai dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Serang, Pemerintah Daerah berusaha untuk melakukan berbagai program inovatif dalam pemberdayaan masyarakat. Program inovasi tersebut diharapkan dapat memperkokoh dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk pulih dan bangkit dari krisis akibat pandemi. Inovasi dalam membuat program ini diperlukan untuk merespon berbagai tantangan pasca Pandemi Covid-19 dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas program, karena dengan inovasi maka akan dapat menciptakan sistem, metode serta teknologi yang dapat menurunkan biaya, mempersingkat proses, dan meningkatkan kinerja. (Herman, 2021).

Pemberdayaan memiliki makna dan arti yang sangat variatif. Pemberdayaan bisa dimaknai sebagai proses proses mengembangkan, memandirikan, masyarakat terpinggirkan dari segala bidang dan sektor kehidupan. Pakar yang lain mengartikan sebagai upaya memfasilitasi masyarakat secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama sehingga tersusun kekuatan dalam komunitas agar bisa berdaya. Dalam konteks ini Pemerintah Kabupaten Serang mencoba memberikan stimulan kegiatan agar masyarakat berdaya.

Berbagai program dan kegiatan tersebut digulirkan pada perangkat daerah yang konsen dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa perangkat daerah tersebut adalah Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Berbagai program dan kegiatan tersebut perlu dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilihat capaiannya serta inovatif dalam upaya memberdayakan masyarakat.

Untuk memajukan industri kreatif yang ada dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai mediator dan fasilitator untuk memudahkan dan menjembatani antara produsen, pelaku usaha dan konsumen. Serta peningkatan inovasi teknologi tepat guna melalui program pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat khusus.

Inovasi menurut Damapour dalam Suwarno (Suwarno & Yogi, 2008: 4) bisa berupa teknologi, produk atau jasa baru, proses produksi yang baru, serta sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Sedangkan menurut Helmi (Helmi & Sutarmanto, 2004) konsep kebaruan dalam inovasi berbeda bagi kebanyakan orang, hal ini dikarenakan inovasi mempunyai sifat yang relatif sehingga pandangan terhadap inovasi tersebut bisa berbeda satu sama lain. Apabila sesuatu

dianggap baru, belum tentu baru bagi yang lain. Dalam membuat program inovatif, bisa jadi sudah dilakukan di tempat lain atau memang program yang benar-benar baru.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan. Tiga upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat menurut Friedman (1994) adalah: 1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), 2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (empowering) dan 3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat bawah (protecting).

Beberapa indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto (2005) adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.

6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya

METODE PENELITIAN

Objek dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Serang, yang terdiri atas dinas dan badan, dengan melakukan tugas dan fungsi dalam program pemberdayaan masyarakat. Perangkat daerah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Pertanian
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
12. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan

Perangkat-perangkat daerah di Kabupaten Serang tersebut akan dianalisis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya terkait dengan program dan kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat, serta bagaimana tupoksi itu dijalankan untuk melayani masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat. Waktu kegiatan penelitian dilaksanakan pada 13 September sampai 30 November 2021.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis berbagai laporan, regulasi dan data yang tersedia dan wawancara dengan berbagai perangkat daerah untuk dilakukan sinkronisasi terkait dengan proyeksi program/kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah dan rencana akan dijalankan.

Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dengan cara mengkaji laporan dan data dari berbagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun di tingkat kabupaten yang berkaitan program/kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Selain data sekunder, peneliti mengkaji dari wawancara tidak terstruktur dari stakeholder terkait pemberdayaan masyarakat serta melakukan observasi/pengamatan pada masyarakat Kabupaten Serang.

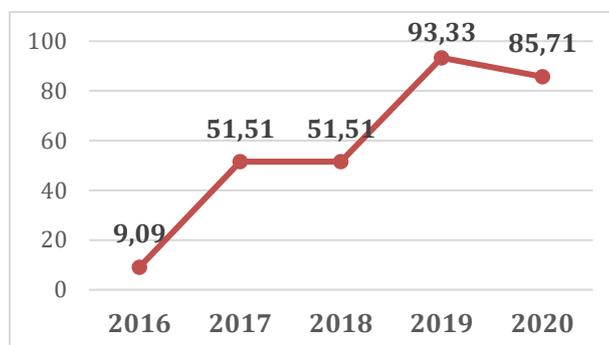
Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan untuk menganalisis berbagai dokumen, program dan kegiatan yang dilakukan perangkat daerah dalam melakukan inovasi berbasis perangkat daerah di Kabupaten Serang. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2004). Hal ini dilakukan berkaitan dengan perilaku aktor dalam menjalankan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Serang.

HASIL DAN DISKUSI

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata memiliki tugas Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan penyediaan sarana keolahragaan di masyarakat dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat pemberdayaan dalam bidang pemuda dan olahraga di tengah masyarakat. Pembinaan organisasi kepemudaan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 hanya mencapai 9,09 persen, kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 51,51 persen, di tahun 2018 memperoleh hasil cakupan yang sama, sedangkan tahun 2019 kembali meningkat hingga mencapai 93,33 persen. Pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 proses pembinaan terhadap organisasi kepemudaan menurun sedikit dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 85,71 % (Gambar 1)



Gambar 1. Persentase Cakupan Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

Sementara itu, untuk mendukung tumbuhnya aktivitas berolahraga di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Serang menyediakan fasilitas sarana prasarana penunjang Olahraga. Pemerintah Kabupaten Serang telah membangun Sarana dan Prasarana Olahraga sebanyak 4% dari total Kecamatan (LKPJ Kabupaten Serang, 2016-2020). Pengembangan pariwisata di Kabupaten Serang pada tahun 2018 terdapat 68 objek wisata alam. Sementara itu jumlah wisata buatan pada tahun 2018 berjumlah 31 buah. Jadi hingga tahun 2018 jumlah total objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serang sebanyak 99 buah. Pada tahun 2020 jumlah wisatawan di Kabupaten Serang mencapai 1.374.043 pengunjung.

Program pengembangan Bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata pada Kabupaten Serang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagai bagian untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Beberapa diantaranya adalah pembinaan organisasi kepemudaan, wirausaha muda, pembinaan pramuka, dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga (Tabel 1).

Tabel 1. Pemberdayaan Masyarakat Pada Urusan Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

NO	PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2020)	TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	%	85,71	96,67	97,50	97,52	98,35	98,36	99
2	Wirausaha Muda	%	31,38	32,71	34,04	35,37	36,70	38,03	39,36
3	Jumlah Pemuda yang Dibina	Orang	137	855	1.730	2.605	3.480	4.355	5.230
4	Pembinaan peserta didik Pramuka	%	99,79	99,79	99,83	99,88	99,92	99,96	100
5	Ketersediaan sarana dan prasarana	%	4	-	12,05	16,88	21,70	26,52	31,34

6	olahraga (Kecamatan) Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata Pemasaran	%	0	0	16,67	33,33	52,78	75	100
7	Pariwisata Kabupaten	%	0	2,03	21,62	41,22	60,81	80,41	100

Sumber: Data olah Peneliti, 2022

Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata, memerlukan inovasi pada beberapa aspek yang akan disebutkan pada poin-poin berikut:

1. Pentingnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan yang kreatif dan produktif, terutama untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi 4.0. Sehingga organisasi pemuda dapat menjadi katalis bagi para pemuda di Kabupaten Serang untuk meningkatkan kapasitas pemuda dalam menghadapi perubahan era dan teknologi.
2. Sistem pembinaan cabang olahraga prestasi daerah, terintegrasi dengan kompetisi olahraga di tingkat kabupaten/ kecamatan/ desa. Sehingga dapat menjaring potensi berbakat dari level terkecil di tingkat desa.
3. Peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana olahraga publik yang merata pada semua cabang olahraga dan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Menurut Wakil Bupati Serang, kedepannya setiap kecamatan disiapkan fasos fasum meliputi lapangan bola, olahraga voli, sarana menembak . Hal yang perlu untuk di antipasti terhadap penyediaan sarana dan prasarana olahraga adalah :
 - a. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang tersedia belum maksimal dan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan di luar olahraga.
 - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang ada belum diperhatikan dengan baik sehingga ada Sarana dan Prasarana yang terbengkalai dan rusak, karena tidak ada perawatan yang memadai.
4. Sektor pariwisata sesungguhnya dapat menjadi akselerator pengembangan sektor-sektor lain kurang berkembang dikarenakan daya saing yang rendah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan promosi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Serang, baik pada level nasional maupun internasional dengan membangun kerjasama yang baik dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*).
6. Program bersama dalam bentuk workshop antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam rangka memajukan sektor pariwisata. Sehingga terjadi sinergi program dan pengembangan infrastruktur pariwisata.

7. Optimalisasi PAD yang diperoleh dari pengembangan sektor pariwisata, dengan cukup banyak kunjungan wisatawan, digunakan kembali untuk pengembangan sektor pariwisata. Konsep pengelolaan pendanaan seperti ini dikenal dengan istilah earmarking atau tagging anggaran.

Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengelolaan Desa berada di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa merupakan bidang baru dalam Struktur Perangkat Daerah. Besaran dana desa dari tahun ketahun terus meningkat. Dana desa tahun 2015 adalah sebesar Rp 20,7 triliun, secara rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Tahun 2016 terdapat peningkatan dana desa menjadi Rp. 46,98 triliun, dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Dana Desa tahun 2020 jumlahnya telah mencapai Rp. 72 Triliun, dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 960,6 juta . Implikasi adanya anggaran pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Serang dan atau anggaran Dana Desa yang besar tersebut diatas, dapat tercermin dalam pelayanan pemerintah desa terus mengalami peningkatan. Beberapa indikator dapat kita lihat dalam pembangunan Desa, diantaranya persentase desa memiliki bumdes aktif, jumlah Teknologi tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan, jumlah desa dengan kategori minimal berkembang, jumlah sarana prasarana desa yang dibangun mandiri (Tabel 2)

Tabel 2. Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Serang Tahun 2020

	Satuan	Realisasi
Prosentase Desa Memiliki BUMDes Aktif	%	2
Jumlah Teknologi Tepat Guna yang Dimanfaatkan	Desa	1
Jumlah Desa dengan Kategori Minimal Berkembang	Desa	22
Jumlah Sarana Prasarana Desa Yang Dibangun Mandiri	Desa	1

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Program pengembangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagai bagian untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Program-program yang telah ditetapkan, telah banyak yang bertujuan untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Beberapa diantaranya adalah Pengembangan Kerjasama Antar Desa (Tabel 3).

Tabel 3. Pemberdayaan Masyarakat Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2020)	TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	%	50	100	100	100	100	100	100
2	Pembinaan Lembaga kemasyarakatan di Desa.	%	90	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

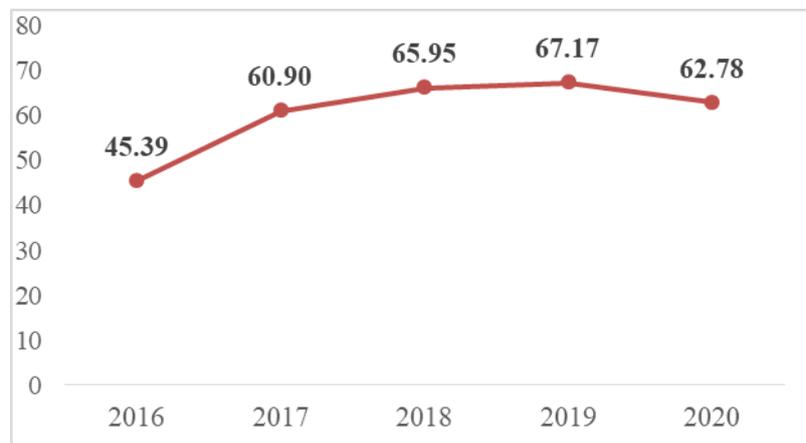
Program pemberdayaan masyarakat pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ditargetkan setiap tahunnya dapat terealisasi hingga 100%; Selanjutnya dilakukan telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa, program yang ada memerlukan inovasi pada beberapa aspek yang akan disebutkan pada poin-poin berikut:

1. Pembangunan desa cenderung pada aspek infrastruktur, padahal selain untuk infrastruktur Dana Desa berdasarkan amanat Undang-undang Desa dapat digunakan untuk:
 - a. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
 Pengembangan ekonomi pertanian dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan inovasi teknologi, serta mengkolaborasi sektor pertanian desa dengan sektor industri.
2. Pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, lebih detail antara lain:
 - a. Pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.
 - b. Peningkatan kapasitas BUMDes dan lembaga kerja sama antar-Desa
 Kuatnya organisasi pada tingkatan desa, serta kapasitas BUMDES yang meningkat akan menjadi motor dalam pengembangan roda sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan. Perencanaan dilakukan secara partisipatif, sehingga masyarakat dapat secara penuh dalam mendukung program-program yang akan dilaksanakan di desa. Sehingga ketika desa sebagai institusi berkembang menjadi mandiri dan maju, masyarakat yang ada di dalamnya ikut terbawa serta
4. Mulai menginisiasi program digitalisasi desa yang merupakan implementasi dari digital sosial inovasi. Digital sosial inovasi adalah jenis inovasi dan kolaborasi dari masyarakat pedesaan yang menggunakan teknologi digital untuk bersama-sama menciptakan produk atau layanan yang menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, digitalisasi desa dapat meningkatkan potensi pemberdayaan SDM dan potensi desa di Kabupaten Serang. (Nugroho, 2021)

Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup

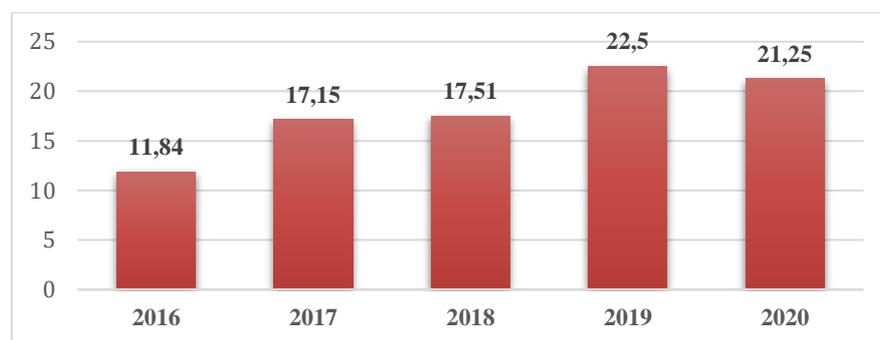
Dinas Lingkungan Hidup menjadi pionir dalam mendorong pola pembangunan berjalan secara berkelanjutan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indeks komposit dari tiga indikator yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai indeks berkisar antara 0-100. Kabupaten Serang berada pada kondisi Cukup Baik dengan rentang nilai: $60 < \text{IKLH} \leq 70$. Indeks Kualitas Hidup pada Kabupaten Serang pada tahun 2020 sebesar 62,78 (Gambar 2).



Gambar 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, 2016-2020. Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Selama tahun 2016-2020, IKLH Kabupaten Serang terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, IKLH mencapai 45,39 meningkat menjadi 67,17 pada tahun 2019. Peningkatan yang signifikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai IKLH dari kategori sangat kurang baik menjadi cukup baik. Namun, pada tahun 2020, nilai IKLH Kabupaten Serang mengalami penurunan signifikan menjadi 62,78. Hal ini menunjukkan perlu adanya evaluasi upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selain indikator IKLH, urusan lingkungan hidup yang ditangani Pemerintah Kabupaten Serang di antaranya adalah penanganan dan pengelolaan sampah. Pada periode tahun 2016-2019 penanganan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kabupaten Serang terus meningkat, tahun 2016 jumlahnya 11,84 dan pada tahun 2020 telah mencapai 21,25 %.



Gambar. 3. Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah 3R Tahun 2016-2020. Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Program pemberdayaan masyarakat pada Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagai bagian untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Program-program yang telah ditetapkan, telah banyak yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam hal ini khususnya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan Penghargaan Lingkungan Hidup (Tabel 4.) .

Tabel 4. Pemberdayaan Masyarakat Pada Urusan Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2020)	TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan/ Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kelompok	4	4	5	6	7	8	9

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

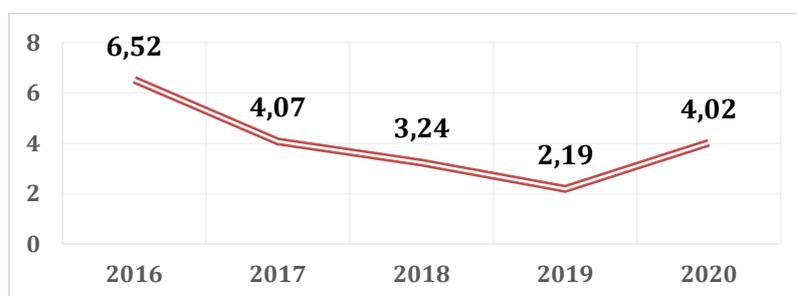
Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup, memerlukan inovasi pada beberapa aspek yang akan disebutkan pada poin-poin berikut:

1. Apresiasi bagi penggerak kelestarian lingkungan hidup dalam bentuk award tidak hanya diberikan kepada kelompok, dapat diperluas jumlahnya. Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Serang dapat menjadi salah satu penerima penghargaan, LSM/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan hidup, termasuk juga dari kalangan dunia usaha yang memiliki Sistem Manajemen Lingkungan yang baik.

2. Mengembangkan skema insentif dalam bentuk pengurangan pajak bumi dan bangunan, kemudahan perizinan, atau apresiasi lainnya, kepada masyarakat/ individu yang memberikan kontribusi positif bagi perbaikan lingkungan hidup .
3. Pendidikan lingkungan hidup dapat dikembangkan terintegrasi dengan kurikulum di sekolah. Sehingga pendidikan lingkungan hidup di Kota Serang dapat berjalan sejak usia dini. Hal ini dalam jangka panjang akan berdampak baik bagi pengelolaan lingkungan hidup.
4. Peningkatan jumlah fasilitas tong sampah, Tempat Pengolahan Sampah Sementara 3R, pengembangan Bank Sampah untuk sampah Anorganik maupun organik.

Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pertanian

Dinas Pertanian menjadi leading sektor kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Kawasan pertanian di Kabupaten Serang seluas 57.194 hektar. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata lapangan usaha pertanian mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 4,01 % (Gambar 4). Sektor pertanian juga memberikan sumbangsih yang tidak sedikit terhadap PDRB Kabupaten Serang yaitu sebesar 9,50 % (2020). Sektor ini terbukti sangat kuat terhadap tekanan (resiliensi), terbukti pada tahun 2020 ketika semua sektor/ lapangan usaha tumbuh minus, Sektor Pertanian tetap tumbuh dengan positif (Tabel 5) .



Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2016-2020. Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha, 2020

Lapangan Usaha	Tahun 2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,02
Pertambangan dan Penggalian	-2,16
Industri Pengolahan	-4,28
Pengadaan Listrik, Gas	-5,73
Pengadaan Air	8,57
Konstruksi	-0,39
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,56

Transportasi dan Pergudangan	-2,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,65

Sumber Data diolah peneliti, 2022.

Walaupun sektor/ lapangan usaha pertanian memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, tetapi petani merupakan mayoritas penduduk miskin. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah taktis, strategis, dan inovatif untuk dapat mengharmonisasikan pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian dengan pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi petani. Program pemberdayaan masyarakat pada Bidang Pertanian bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya untuk petani dan peningkatan produksi pertanian. Beberapa diantaranya adalah Perizinan Usaha Pertanian, penyuluhan kelompok tani, dan kemudahan dalam perizinan berusaha (Tabel 6).

Tabel 6. Pemberdayaan Masyarakat Pada Urusan Pertanian

NO	PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE						
			(2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Perizinan Usaha pertanian	%	14	15	17	20	23	25	27
2	Perizinan usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan.	%	15	17	19	20	22	24	25
3	Penyuluhan Pertanian (Bina Kelompok Tani)	Kelompok	45	50	53	55	57	60	63

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

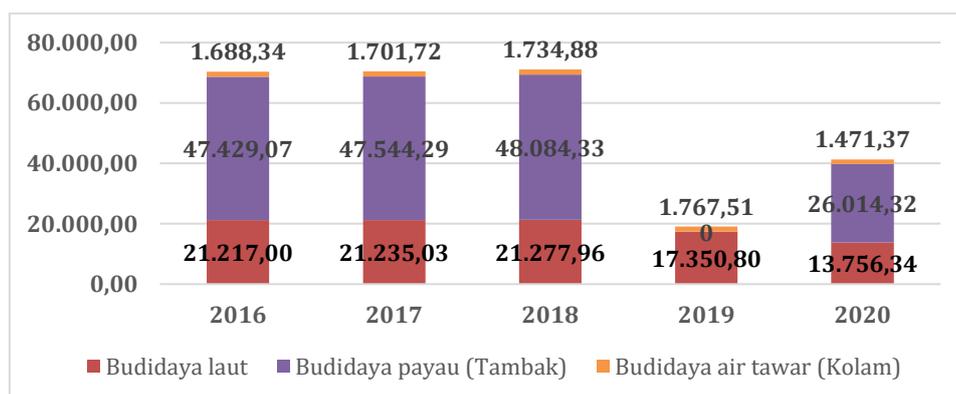
Telaah terhadap kegiatan yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, memerlukan inovasi pada beberapa aspek yang akan disebutkan pada poin-poin berikut:

1. Sektor pertanian dapat dihubungkan dengan sektor industri, dengan menerapkan Standar Operating Procedure kualitas hasil pertanian yang diharapkan oleh Industri. Pemerintah Daerah dapat menjadi katalis dalam membangun kolaborasi antara pihak-pihak terkait.
2. Kemajuan teknologi dan internet dapat dimanfaatkan sektor pertanian untuk memasarkan hasil pertanian langsung ke tangan konsumen. Rente pertanian yang panjang dapat dipotong sehingga margin yang diperoleh dari petani dapat lebih besar dan berdampak signifikan bagi peningkatan pendapatan petani. Bentuk program dapat berupa: pelatihan dan pengembangan website sebagai sarana pemasaran, pengecekan harga secara online, termasuk mencari modal pertanian.

3. Mengembangkan mekanisme insentif bagi petani muda untuk bertani. Sebagaimana program petani milenial yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat. Hal-hal yang terkait dengan petani milenial adalah:
 - a. Inventarisasi Potensi Lahan
 - b. Inventarisasi Peluang Pasar
 - c. Penentuan Komoditas Pertanian
 - d. Pendataan Petani Millennial
 - e. Pengembangan Kapasitas Petani Milenial
 - f. Pemberian Bantuan Benih, Bibit, Pupuk, Pestisida, dan Peralatan
 - g. Pemberian Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran Produk

Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mendorong kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Serang terus meningkat. Pada tahun 2016 mencapai angka 1,19 persen selanjutnya kontribusi sektor perikanan pada tahun 2019 naik tajam menjadi 9,50 persen. Produksi nilai penangkapan ikan yang dihasilkan oleh Kabupaten Serang berasal dari perikanan laut dan perikanan tawar. Budidaya ikan di tambak menyumbang paling besar bagi Kabupaten Serang, mencapai 26.014,32 kilogram pada tahun 2020, menurun dari tahun 2016 sebesar 47.429 kilogram. Angka produksi tersebut diikuti oleh budidaya laut sebesar 13.756,34 kilogram (2020) dan ikan kolam sebesar 1.471,37 kilogram (2020).



Gambar 5. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya Tambak, dan Budidaya Payau. Sumber: Data diolah peneliti 2022

Program pemberdayaan masyarakat pada Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam hal ini khususnya untuk nelayan dan produksi perikanan. Beberapa diantaranya adalah bantuan sarana penangkapan ikan, bina kelompok nelayan, pembinaan kelompok pengolahan sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Pemberdayaan Masyarakat Pada Urusan Pangan dan Perikanan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR	SAT UAN	BASE LINE (2020)	TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Bantuan sarana penangkapan ikan	%	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
2	Bina kelompok nelayan	%	3,95	3,95	15,81	17,79	19,76	21,74	23,72
3	Pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil	%	5,71	5,71	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
4	Bantuan sarana perikanan budidaya	%	1,71	2,86	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
5	Pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil	%	0	20	20	20	20	20	20
6	Bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	0	16	16	16	16	16	16

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

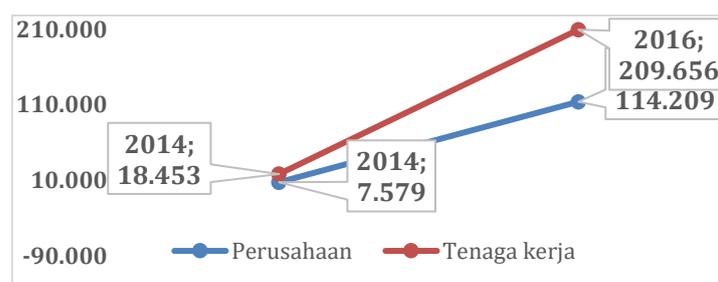
Secara umum program yang telah ada meliputi bantuan sarana-prasarana dan pembinaan kelompok. Selanjutnya telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, memerlukan inovasi pada beberapa aspek yang akan disebutkan pada poin-poin berikut:

1. Pemberdayaan Nelayan menurut Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan No. 7 tahun 2016 meliputi:
 - a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
 - b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
 - c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan,
 - d. Memperkuat kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; Dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
 - e. Menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.
2. Nelayan perlu mendapatkan pemberdayaan dalam hal potensi lestari perikanan. Termasuk model kelola zonasi perikanan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Tangkapan ikan perlu dioptimalkan berdasarkan perhitungan Maximum Sustainability Yield (MSY). Sehingga potensi perikanan pada zona tangkap di Kabupaten Serang dapat terus lestari

3. Diversifikasi produk hasil perikanan akan berdampak positif bagi pendapatan nelayan serta peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat di Kabupaten Serang.
4. Pentingnya kemudahan dalam memperpanjang izin kapal untuk perikanan tangkap. Sehingga nelayan dalam berlayar dengan tenang, tanpa khawatir ditangkap dan sarana prasarananya ditangkap.

Program Pemberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2018, tercatat ada 119 perusahaan besar dengan tenaga kerja terserap sebanyak 50.522 jiwa. Pada tahun yang sama, terdapat 124 industri sedang dengan 5.683 tenaga kerja. Adapun pada tahun 2016, terdapat 114.209 industri kecil/rumah tangga dengan 209.656 tenaga kerja (Gambar 6).



Gambar 6. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja pada Industri kecil/Rumah Tangga. Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

Program pemberdayaan masyarakat pada Urusan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam hal Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Beberapa diantaranya adalah pelayanan izin usaha simpan pinjam, mengembangkan usaha mikro menjadi usaha kecil, peningkatan omzet pedagang (Tabel 8).

Tabel 8. Pemberdayaan Masyarakat Pada Urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE (2020)	TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan izin usaha simpan pinjam	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	%	74,72	78	81	84	87	89,73	93
3	Memberdayakan Usaha Mikro untuk menjadi Usaha Kecil (Naik kelas)	Unit	-	15	15	15	15	15	15
4	Memberdayakan Pedagang agar usahanya meningkat	%	2	2	2	2	2	2	2

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

Selanjutnya telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pada urusan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, memerlukan inovasi pada beberapa aspek yang akan disebutkan pada poin-poin berikut:

1. Program yang berorientasi pada pengembangan daya saing lokal yang terhubung dengan sumber daya lokal di suatu wilayah (Doloreux dan Parto, 2005). Tahapan awal untuk mencapai fase yang di maksud tersebut, perlu adanya proses assessment/ penaksiran. Metode yang paling umum digunakan pada tingkat masyarakat adalah Participatory Rural Appraisal. Proses yang partisipatif akan membuat masyarakat dapat menjalankan program yang dilaksanakan semaksimal mungkin.
2. UMKM Go Digital merupakan program yang selaras dengan program pada tingkat nasional. Hingga 2024 ditargetkan sebanyak 30 juta UMKM dapat Go Digital atau menjajakan produknya online/ daring (dalam jaringan) . Program ini harus diadaptasi oleh Pemerintah Daerah.
3. Pengembangan Sentra Industri Kreatif, akan turut berkontribusi menghadirkan ekosistem kreatif di masyarakat. Berupa kota kreatif/ desa kreatif dengan dukungan infrastruktur transportasi, komunikasi maupun informasi.

Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang bergerak di Sektor kesehatan merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam suatu daerah. Dalam UU Pemerintahan Daerah, sector kesehatan ini dimasukan ke dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kondisi existing sektor kesehatan di Kabupaten Serang saat ini dihadapi oleh berbagai persoalan yang perlu dijawab dengan kebijakan-kebijakan yang inovatif. Permasalahan tersebut, di antaranya, adalah pertama, angka kematian bayi dan angka kematian ibu yang cenderung tinggi apabila dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Pada 2019, angka kematian bayi di Kabupaten Serang sebesar 9,17 kematian per 1.000 kelahiran hidup, yang merupakan tertinggi ketiga dalam wilayah Provinsi Banten. Sedangkan, angka kematian ibu juga cenderung tinggi pada 2019, yakni 221 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Walau pada 2020, telah terjadi penurunan angka kematian bayi dan ibu, tetapi Pemerintah Kabupaten Serang harus terus bekerja keras dengan menggunakan pendekatan inovatif serta memberdayakan masyarakat dalam menekan angka kematian bayi dan ibu tersebut. Kedua, fasilitas dan layanan kesehatan, yang masih membutuhkan perhatian yang lebih serius. Kondisi existing saat ini hanya ada satu Rumah Sakit milik pemerintah di Kabupaten Serang, yakni RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara, dan tiga Rumah Sakit swasta, yakni RS Hermina Ciruas, RS Kurnia Serang dan RS Permata Sedang. Sedangkan, Kabupaten Serang memiliki 31 puskesmas yang tersebar di 29 kecamatan. Berdasarkan kondisi ideal rasio 1 unit rumah sakit melayani 100.000 penduduk dan 1 unit puskesmas melayani 30.000 penduduk (dengan asumsi jumlah penduduk pada 2019, idealnya Kabupaten Serang memiliki 50

unit puskesmas), sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat di dalam bidang kesehatan.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan. Beberapa diantaranya adalah melakukan pendirian posyandu aktif, melaksanakan kegiatan kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, meningkatkan desa menghentikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan dengan mengikuti diklat sesuai standar kompetensi (Tabel 9).

Tabel 9. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No	PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE (2020)	TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendirian Posyandu Aktif	%	55	55	55	60	65	70	75
2	Kegiatan Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	%	0	60	60	60	70	80	90
3	Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	%	15	15	20	25	35	40	50
4	Peningkatan kapasitas terhadap sumber daya manusia di sektor kesehatan dengan mengikuti diklat sesuai standar kompetensi	%	20	25	25	25	25	25	25

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Program-program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ini perlu dimaksimalkan untuk mendorong masyarakat untuk hidup sehat, sehingga diharapkan dapat menekan angka kematian bayi dan ibu, serta sebagai solusi alternatif terhadap minimnya fasilitas kesehatan yang tersedia saat ini. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan perlu dilakukan secara inovatif, agar bisa tepat sasaran dalam menjawab persoalan yang ada. Beberapa program inovasi di sektor kesehatan yang dilakukan adalah pembuatan dan pengembangan sistem pencegahan dan pelaporan kematian ibu dan bayi baru lahir (aplikasi maternal death) dan mensosialisasikan aplikasi ini ke masyarakat Kabupaten Serang.

Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sektor pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Di Kabupaten Serang, salah satu tujuan utama yang ingin dicapai pada sektor pendidikan adalah pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan partisipasi sekolah dan fasilitas sekolah di Kabupaten Serang. Pertama, ketika berbicara mengenai partisipasi sekolah, maka indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemerataan pendidikan di suatu wilayah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka

Partisipasi Murni (APM). Selama periode 2016-2020, APK Kabupaten Serang pada jenjang SMP mengalami kenaikan, sedangkan APK pada jenjang SD mengalami fluktuasi. Sedangkan, nilai APM Kabupaten Serang menunjukkan tren peningkatan pada jenjang SD dan SMP selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016, APM jenjang SD sebesar 99,98 persen mengalami peningkatan hingga sebesar 100 persen pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 semua penduduk usia SD atau bersesuaian sedang menempuh pendidikan SD. Nilai APM jenjang SMP pada tahun 2016 sebesar 91,78 persen meningkat 99,45 persen pada tahun 2020. Kedua, fasilitas pendidikan, dimana pada tahun 2020 secara total terdapat 1.504 unit sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs, dan MA. Jumlah unit sekolah yang semakin bertambah menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan.

Pada sektor kebudayaan, salah satu indikator keberhasilannya diukur dengan cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya di Kabupaten Serang. Selama empat tahun terakhir hanya pada tahun 2016 cakupan indikator tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2017-2019, realisasi capaian indikator tersebut sama dengan target yang ingin dicapai dengan realisasi capaian sebesar 100,00 persen. Selanjutnya, di tahun 2020, realisasi capaian indikator tersebut jauh dengan target yang ingin dicapai dengan realisasi capaian sebesar 26 persen.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan. Beberapa, diantaranya, adalah program pengembangan kurikulum dalam penerapan muatan lokal di sekolah, program pengembangan kelompok budaya dan program pengembangan kelompok kesenian (Tabel 10).

Tabel 10. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pendidikan dan Budaya

NO	PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2020)	TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Pengembangan Kurikulum dalam penerapan muatan lokal di sekolah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Pengembangan Kelompok Budaya	Kelompok Yang Dibina	30	30	35	42,5	57,5	67,5	72,5
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kelompok yang Dibina	30	30	35	42,5	57,5	67,5	72,5

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan, memerlukan inovasi pada beberapa aspek. Pertama, pengembangan kurikulum dalam penerapan muatan lokal di sekolah dengan

melibatkan para pemangku atau tokoh adat di kabupaten serang dan para budayawan lokal. Model pengembangan kurikulum juga bisa dilakukan dengan pola modul, dimana siswa dapat belajar secara mandiri (self instruction) atau langsung kepada para tokoh adat atau budayawan lokal. Kedua, selain melakukan pembinaan, perlu juga dilakukan inovasi dengan membuat suatu festival seni dan budaya Kabupaten Serang bertaraf nasional atau internasional yang berkelanjutan setiap tahunnya, dengan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19, sehingga bisa dilaksanakan secara online maupun offline tergantung situasi dan kondisi.

Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Sosial

Salah satu fokus utama yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hambatan tersebut dapat berupa kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung. Berdasarkan kondisi existing saat ini, jumlah PMKS mengalami penurunan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, karena kemampuan Dinas Sosial dalam menangani PMKS ini cenderung meningkat. Dari 2016 yang jumlah PMKS-nya sebanyak 130.070 jiwa, lalu menurun hingga menjadi 93.338 jiwa pada 2020. Sedangkan PMKS yang tertangani juga meningkat secara signifikan dari 58.127 jiwa (44,69%) pada 2016 menjadi 91.695 jiwa (98,24%) pada 2020. Kinerja positif ini tentu perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pembuatan program-program pemberdayaan masyarakat di dinas sosial secara inovatif.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang sosial telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di bidang sosial. Beberapa, diantaranya, adalah program pembinaan tenaga kesejahteraan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial terhadap fakir miskin, dan program penanganan bencana untuk korban bencana menerima bantuan sosial pada masa tanggap darurat (Tabel 11.).

Tabel 11. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial

NO	PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE						
			(2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	%	80	80	80	80	80	80	80
2	Program Rehabilitasi Sosial	%	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin	%	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

4	Program Penanganan Bencana untuk korban bencana menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100
---	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, memerlukan inovasi pada beberapa aspek. Pertama, pembinaan tenaga kesejahteraan sosial, selain dengan melakukan pelatihan rutin secara berkala, perlu juga membangun kerja sama berupa kursus singkat dengan organisasi-organisasi donor dari luar negeri yang memang fokus kepada isu-isu kesejahteraan sosial. Dengan begitu, diharapkan para tenaga kesejahteraan sosial memiliki perspektif yang luas terkait dengan konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Kedua, terkait program rehabilitasi sosial, perlindungan fakir miskin, dan korban bencana, Dinsos Kabupaten Serang dapat berinovasi dengan membentuk lembaga food bank atau bank makanan. Konsep bank makanan ini adalah mengumpulkan makanan berlebih yang masih layak dikonsumsi, seperti dari restoran, hotel, atau makanan dari usaha retail yang menjelang expired (tetapi masih layak dikonsumsi), dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Konsep ini bisa diterapkan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga bank makanan yang ada di Indonesia, maupun dengan membentuknya sendiri. Hal ini bisa sejalan dengan rencana Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang menggodok RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial, yang salah satu tujuannya adalah menumbuhkan organisasi-organisasi bank makanan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menangani Sektor ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang bukan pelayanan dasar. Namun, aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu elemen yang krusial dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Di Kabupaten Serang, beberapa masalah yang muncul di sektor ketenagakerjaan, antara lain, jumlah perusahaan yang telah melakukan syarat kerja dan jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi. Kondisi existing saat ini, realisasi jumlah perusahaan yang telah melakukan syarat kerja sebanyak 614 perusahaan dari 820 perusahaan yang ada di Kabupaten Serang. Selanjutnya, realisasi jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi sebesar 100 persen dari target sementara RPJMD. Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang mengalami peningkatan dari 66,38 poin pada 2019 menjadi 66,70 poin yang menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Serang.

Pada sektor transmigrasi, Kabupaten Serang berencana memberangkatkan 10 Kepala Keluarga dari 15 kuota KK yang tersedia untuk mengikuti program transmigrasi

menuju Kalimantan dan Sulawesi pada akhir 2021 ini. Jumlah tersebut memang sesuai dengan kuota program transmigrasi yang diperuntukan Kabupaten Serang pada 2021. Meski begitu, kuota ini bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kesediaan kabupaten lain di Provinsi Banten untuk mengambil kuota tersebut atau tidak. Sebelumnya, pada 2020, Disnakertrans Kabupaten Serang tidak melakukan program transmigrasi. Sedangkan, pada 2019, Disnakertrans mengirim sebanyak 5 KK asal Kabupaten Serang ke Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dipilihnya Gorontalo sebagai lokasi transmigrasi karena banyak warga Kabupaten Serang yang telah berhasil sebagai penghasil jagung unggulan dan kualitas ekspor. Program pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Beberapa, diantaranya adalah program pelatihan kerja berbasis kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja lokal, dan program pembangunan kawasan transmigrasi (Tabel 12.).

Tabel 12. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

NO	PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2020)	TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Pelatihan kerja berbasis kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Penempatan Tenaga kerja lokal	%	13,38	15	20	25	30	35	40
3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah KK	n/a	10	15	20	25	30	35

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, memerlukan inovasi pada beberapa aspek. Pertama, konsep pelatihan kerja berbasis kompetensi dapat diselenggarakan dengan konsep e-Learning secara berkala dengan melibatkan para pakar di bidangnya dari lintas daerah di Indonesia. Dengan konsep ini, maka untuk menghadirkan narasumber yang kompeten dapat dilaksanakan secara mudah dan murah. Kedua, penempatan tenaga kerja lokal, Disnakertrans dapat melakukan berbagai kegiatan, seperti job canvassing (aktif mencari lowongan kepada perusahaan, menyampaikan ke pencari kerja, dan mempertemukan pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja); mengadakan bursa kerja (job fair) secara berkala baik sendiri maupun bekerja sama dengan institusi lain, seperti kampus; dan menciptakan portal khusus bursa kerja secara online untuk lingkup Kabupaten Serang yang dapat diakses oleh masyarakat. Sedangkan, ketiga, terkait program pembangunan kawasan transmigrasi,

diperlukan inovasi dengan menghubungkan para transmigran asal Kabupaten Serang yang telah sukses di suatu daerah dengan calon transmigran, melalui sistem mentorship, dimana transmigran yang telah sukses dapat menjadi mentor dari calon transmigran. Kegiatan mentorship dapat dilakukan secara online, baik melalui telepon, atau media lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki memiliki ukuran yang sangat jelas dalam mengukur tingkat keberhasilan programnya, yakni capaian peserta KB aktif dan menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Pertama, kegiatan pelayanan KB telah dilaksanakan di sejumlah tempat pelayanan pada 2020 sebanyak 64 unit, yang terdiri atas 32 unit fasilitas kesehatan pemerintah dan 32 unit fasilitas kesehatan swasta pada 29 kecamatan. Pada 2019, peserta KB aktif sebanyak 239,477 orang, dimana angka pasangan usia subur sebanyak 316,652 orang. Sedangkan, dari segi penambahan jumlah penduduk, berdasarkan sensus penduduk pada September 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang meningkat sekitar 10,6 persen dari 1,5 juta penduduk menjadi 1,6 juta penduduk. Sektor pemberdayaan perempuan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) telah meluncurkan program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup perempuan. Program ini akan difokuskan dilaksanakan di Kecamatan Padarincang. Selain itu, kondisi saat ini, perempuan dan anak merupakan pihak yang sangat terdampak dengan pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang, sama halnya dengan di daerah lain. Di Kabupaten Serang setidaknya ada 4.951 perempuan dewasa dan 11.249 perempuan hamil yang terdampak dengan Covid-19.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beberapa, diantaranya adalah program peningkatan kualitas keluarga (home industri perempuan aktif di lokasi P2WKSS), pembinaan keluarga berencana, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (anggota poktan tribina) (Tabel 13.).

Tabel 13. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2020)	TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Peningkatan kualitas keluarga (home industri perempuan aktif di lokasi P2WKSS)	%	44,59	45	46	46,5	47	47,5	48
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi modern (CPR)	76,16	69,16	69,66	70,16	70,6	71,1	71,6

3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Anggota Poktan tribina	80	80	80	80	80	80	80
---	--	------------------------	----	----	----	----	----	----	----

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memerlukan inovasi pada beberapa aspek. Pertama, memberikan pendampingan perempuan yang aktif dalam membuat home industri dalam P2WKSS untuk memasukkannya ke dalam marketplace secara online yang banyak bermunculan, dan menjalin kerja sama dengan penyedia jasa marketplace yang ada untuk memudahkan para perempuan yang aktif membuat home industri tersebut untuk memasarkan produknya. Kedua, menciptakan desa/kampung Keluarga Berencana (KB) dengan melakukan berbagai kegiatan mural atau canvassing dengan melibatkan seniman/street artist terkait dengan pentingnya program keluarga berencana.

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan

Dinas ini berperan dalam Akses air minum yang layak merupakan salah satu kriteria rumah layak huni. Akses air minum dianggap layak jika sumber air minum utama rumah tangga dan keperluan lainnya berasal dari sumber air terlindungi. Berdasarkan data pada 2019, rumah tangga dengan sumber air utama sumur bom/pompa mencapai 64,93 persen, selanjutnya sumber air terbanyak kedua adalah sumur atau mata air terlindungi sebanyak 17,29 persen. Sedangkan, sumber air utama terbanyak ketiga adalah sumur atau mata air tidak terlindungi sebanyak 7,53 persen. Sedangkan, banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Serang juga terus dikurangi dengan melakukan berbagai perbaikan. Sejak akhir 2015 terdapat 13.649 RTLH, lalu melalui berbagai sinergi program, hingga 2020, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKTB) tuntas memperbaiki sebanyak 9.198 RTLH. Program ini merupakan sinergi Pemkab Serang, Pemerintah Pusat, Pemprov, Infak ASN, Baznas Kabupaten Serang dan sumbangan pihak swasta. Selain itu, selain mengandalkan APBD, Kabupaten Serang juga memperoleh bantuan dari Kementerian PUPR untuk pembangunan rumah dan perbaikan RTLH yang dilakukan dua tahap, yakni tahap pertama sejumlah 600 unit dan tahap kedua sejumlah 400, hingga total sebanyak 1.000 unit pada 2021.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan tata bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan tata bangunan. Beberapa, diantaranya adalah program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan program perbaikan rumah di kawasan permukiman kumuh (Tabel 14.).

Tabel 14. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perumahan,
 Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan

NO	PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2020)	TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	% rumah tangga mendapatkan akses air melalui SPAM	88,58	89,01	89,53	89,95	90,35	90,73	91,08
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan perbaikan rumah	6,5	6,82	18,18	22,22	28,57	40	66,6

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Telaah terhadap program yang ada untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan tata bangunan, memerlukan inovasi pada beberapa aspek. Pertama, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, perlunya meneruskan program pemerintah pusat yakni SPAM berbasis masyarakat, yakni dengan cara memanfaatkan sumber air skala kecil yang dekat dengan permukiman masyarakat. Pemerintah Kabupaten Serang membantu masyarakat menarik air dari sumbernya dengan pemasangan pipa, sementara pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat yang menikmati air tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang dapat melakukan monitoring pengelolaan tersebut secara berkala. Kedua, program perbaikan kawasan permukiman kumuh, dapat dilakukan inovasi dengan mengecat rumah tersebut secara warna warni atau membuat kampung warna warni yang telah banyak diterapkan di banyak daerah. Dengan cara ini, kawasan kumuh bisa bertransformasi menjadi tempat wisata lokal bagi warga sekitarnya.

PENUTUP

Simpulan

Beberapa Inovasi program berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Serang yang urgen untuk dikembangkan antara lain adalah: a. Pembinaan cabang olahraga yang terintegrasi dengan kompetisi olahraga di tingkat kabupaten/ kecamatan/ desa. b. Pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*). c. Program inovasi teknologi (*Teknologi Tepat Guna*), serta mengkolaborasi sektor pertanian desa dengan sektor industri. d. Pengembangan skema insentif bagi pihak individu/ komunitas yang melakukan perbaikan lingkungan e. Program Petani Millennial (*Benchmark Provinsi Jawa Barat*) f. Pengembangan Kota/ Desa Kreatif Secara umum inovasi program perlu memanfaatkan dan beradaptasi pada potensi lokasi dan pemanfaatan perkembangan teknologi digital 4.0.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam menerapkan inovasi program berbasis pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Pengembangan program berbasis pemberdayaan masyarakat dilakukan secara partisipatif atau melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan.
2. Proses assessment merupakan tahapan awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan kegiatan pemberdayaan. Proses penaksiran bagi individu/ kelompok terhadap kesesuaian program akan memastikan program dapat berkelanjutan.

REFERENSI

- Allahyari, M. S., & Chizari, M. (2010). Potentials of new information and communication technologies (ICTs) in agriculture sector. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 4(January), 115–120.
- Helmi, Avin Fadilla & Sutarmanto, Hadi. (2004) *Kewirausahaan dan Inovasi*. Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
- Herman Yaározatulo Harefa. (2021). Analisis Inovasi Perencanaan Sebagai Tata Kelola Yang Baik di Berbagai Provinsi. *Jurnal Studi Inovasi* Vol. 1 No. 1: 16-21
- Lucky Nugroho. (2021). *Konsep Pembangunan dan Pengembangan Desa Digital*. Pemerintah Kabupaten Serang. 2021. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Serang Tahun 2016-2020.
- Santosa, I., Sugiyanto, Kristiyanto, A. (Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Publik Di Kabupaten Kudus
- Suwarno, Yogi. (2008) *Inovasi di Sektor Publik*. STIA-LAN Press, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Banten News. 7 April 2021. *Disnakertrans Kabupaten Serang Akan Kirim 15 KK untuk Program Transmigrasi*. <<https://www.bantennews.co.id/disnakertrans-kabupaten-serang-akan-kirim-15-kk-untuk-program-transmigrasi/>> diakses pada 14 November 2021.
- Fakta Banten. 19 Februari 2020. *Tahun 2020 m DPPKBP3A Kabupaten Serang Siap Optimalisasi dan Tingkatkan Capaian Program*. <<https://faktabanten.co.id/serang/tahun-2020-dkbp3a-kabupaten-serang-siap-optimalisasi-dan-tingkatkan-capaian-program/>> diakses pada 14 November 2021.
- Faidah Umu Safuroh. Detiknews. 10 Juli 2020. *Pemkab Serang Akan Perbaiki 9.198 RTLH hingga Akhir Tahun 2020*. <<https://news.detik.com/berita/d-5087767/pemkab-serang-akan-perbaiki-9198-rtlh-hingga-akhir-tahun-2020>> diakses pada 15 November 2021.

- Gede Eka Dharma Antara. Tahun 2015. Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Memajukan Industri Kreatif di Bali. Publis di neliti.com
- Hendra Hendrawan. RMOL Banten. 17 Juni 2021. Dengan Cara Ini DKBP3A Kabupaten Serang Tingkatkan Taraf Hidup Perempuan. < [https://www.rmolbanten.com/read/2021/06/17/23772/ Dengan-Cara-Ini-DKBP3A-Kabupaten-Serang-Tingkatkan-Taraf-Hidup-Perempuan->](https://www.rmolbanten.com/read/2021/06/17/23772/Dengan-Cara-Ini-DKBP3A-Kabupaten-Serang-Tingkatkan-Taraf-Hidup-Perempuan->) diakses pada 14 November 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2831/perempuan-dan-anak-terdampak-covid-19-di-serang-banten-harus-bangkit-dari-situasi-sulit>
- Petani Milenial. 2021. <https://petanimilenial.jabarprov.go.id/>
- Raden Wirna. Eksis Banten. 26 Oktober 2020. Penduduk Kabupaten Serang Bertambah Jadi 1,6 juta Orang. <[https://ekbisbanten.com/penduduk-kabupaten-serang-bertambah-jadi-16-juta orang/#:~:text=SERANG%2C%20EKBISBANTEN.COM%20%E2%80%93%20Badan,sensus%20penduduk%20pada%20September%202020>](https://ekbisbanten.com/penduduk-kabupaten-serang-bertambah-jadi-16-juta-orang/#:~:text=SERANG%2C%20EKBISBANTEN.COM%20%E2%80%93%20Badan,sensus%20penduduk%20pada%20September%202020>) diakses pada 14 November 2021.
- Sumarto, S.W. 2021. Akuntabilitas Dana Desa.
- Tirtayasa, P. 2021. Wakil Bupati Serang Akui Sarana Olah Raga di Wilayahnya Minim. <https://poskota.co.id/2021/09/24/wakil-bupati-serang-akui-sarana-olah-raga-di-wilayahnya-minim>
- Yuni Astutik. CNBC Indonesia. 1 April 2021. IPM Tumbuh, Serang Tak Lagi Jadi Kabupaten Pengangguran. <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210401202636-4-234840/ipm-tumbuh-serang-tak-lagi-jadi-kabupaten-pengangguran>> diakses pada 13 November 2021.